

ANALISIS FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Yulistia, Novi Yanti*, Ika Purwasih

Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti Padang

*email: dienqu955@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to determine the effect of behavioral organization in the measure by training, clarity of purpose, and superior to the regional financial accounting system. Research sample is 30 respondent people have authority including civil servants who work in the financial sector in a body of regional financial the government province of West Sumatera . Data used are primary data obtained through questionnaire dissemination of research. In this research study variable grouped into two categories. The first independent variable consisted of the organization as measured by behavioral training, clarity of purpose and superior support. The second is the dependent variable is the area of financial accounting systems. To perform hypothesis testing is used in quantitative data analysis methods. Hypothesis test equipment used in the process of testing hypothesis is multiple regression model, statistical f-test and statistical t-test. Based on result of testing hypothesis was found that training did not significantly influence regional financial accounting system. The second hypothesis testing results show that the clarity of purpose did not significantly effect the usefulness of the area of financial accounting system, the third hypothesis testing result indicate that support employer significant effect on the area of financial accounting system usability, while the fourth hypothesis testing result show that the training, clarity of purpose, and supervisor support a significant effect on the financial accounting system in a body of regional financial the government province of west sumatera.

Keywords: *behavioral organization, training, clarity goals, support employers and financial accounting system*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keperilakuan organisasi yang diukur dengan pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian dilakukan kepada 30 orang responden yang mempunyai wewenang dalam bidang keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner penelitian. Di dalam penelitian ini dikelompokkan variabel penelitian ke dalam dua kategori. Pertama variabel independen yang terdiri dari keperilakuan organisasi yang diukur dengan pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan. Kedua adalah variabel dependen yaitu sistem akuntansi keuangan daerah. Untuk melakukan pengujian hipotesis maka digunakan metode analisis data secara kuantitatif. Alat uji hipotesis yang digunakan dalam proses pengujian hipotesis adalah model regresi linear berganda, uji f-statistik dan uji t-statistik. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama ditemukan bahwa pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kejelasan tujuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, sedangkan hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Kata kunci: Keperilakuan Organisasi, Pelatihan, Kejelasan Tujuan, Dukungan Atasan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Detail Artikel :

Diterima : 08 September 2017

Disetujui : 27 September 2017

[DOI : 10.22216/jbe.v2i3.2444](https://doi.org/10.22216/jbe.v2i3.2444)

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan salah satu bagian dari demokratisasi guna menciptakan sebuah sistem yang *power share* pada setiap level pemerintahan. Selain itu otonomi daerah juga menuntut kemandirian sistem manajemen yang ada di daerah. Pemberian otonomi daerah pada kabupaten dan kota bertujuan agar pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola sistem dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas.

Pemerintah telah mengatur sistem akuntansi pemerintahan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat. Oleh karena itu sistem akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah daerah diatur dalam Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Pemerintah daerah selalu berupaya untuk mengintensifkan langkah-langkah pengelolaan keuangan daerah dengan baik guna mencapai *Good Government Governance*. Langkah yang dilakukan pemerintah diberbagai Peraturan dan Undang-Undang adalah dengan terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam mengelola keuangan daerah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas keuangan yang dikelolanya adalah dalam bentuk penyampaian laporan keuangan.

Selaku pengelola dana public, pemerintah daerah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu diperlukan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang baru untuk menggantikan sistem lama yang selama ini digunakan oleh pemerintah daerah yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang telah diterapkan sejak 1981. Sistem MAKUDA tersebut sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang saat ini.

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 yang kini telah diperbaharui oleh Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Proses akuntansi tersebut didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu, maka hal ini terlihat jelas bahwa sistem akuntansi sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan di daerah.

Sistem akuntansi pada organisasi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD selaku entitas akuntansi akan melaksanakan sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas.

Pengembangan sistem akuntansi memerlukan suatu perencanaan dan

pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Keberhasilan suatu implementasi sistem tidak hanya dilihat dari teknis pengembangan dan penguasaan teknis saja, namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi. Suatu studi yang menyelidiki bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok, serta struktur mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dalam organisasi disebut dengan perilaku organisasi. Perilaku mengacu pada apa yang ingin dilakukan oleh orang dalam organisasi, bagaimana orang-orang tersebut dibentuk, dan apa sikap mereka (Lubis, 2010)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Diana, 2012) tentang Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini pernah dilakukan oleh Diana pada tahun 2012. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor organisasional yang diukur dari kejelasan tujuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hanya pelatihan dan dukungan atasan yang berpengaruh signifikan untuk meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan Badan Keuangan Daerah adalah satu-satunya instansi pemerintah yang melakukan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena sebelum BKD menerapkan aturan tersebut kepada instansi lain maka BKD haruslah menjalankan aturan dan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip keprilakuan organisasi terhadap sistem akuntansi terlebih dahulu.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Apakah Keperilakuan Organisasi (pelatihan) berpengaruh terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. 2) Apakah Keperilakuan Organisasi (kejelasan tujuan) berpengaruh terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. 3) Apakah Keperilakuan Organisasi (dukungan atasan) berpengaruh terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. 4) Apakah Pelatihan, Kejelasan Tujuan, Dukungan Atasan berpengaruh terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui: 1) Pengaruh faktor keprilakuan organisasi (pelatihan) terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. 2) Pengaruh faktor keprilakuan organisasi (kejelasan tujuan) terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. 3) Pengaruh faktor keprilakuan organisasi (dukungan atasan) terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Dan 4) Pengaruh pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Perilaku Organisasi adalah suatu studi yang menyelidiki bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok, serta struktur mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dalam organisasi. Perilaku mengacu pada apa yang ingin dilakukan oleh orang dalam organisasi, bagaimana orang-orang tersebut dibentuk, dan apa sikap mereka (Lubis, 2010). Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu kelompok tertentu (Rivai, 2008).

Moorhead dan Griffin (2013:3) juga menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah studi mengenai perilaku manusia dalam situasi organisasi, mengenai titik temu antara perilaku manusia dan organisasi, serta mengenai organisasi itu sendiri. Manusia bekerja dengan dibatasi oleh organisasi. Perilakunya dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk ukuran organisasional dan struktur. Gaya kepemimpinan atau filosofi manajemen, otoritas/hubungan pertanggungjawaban, hubungan status, dan norma-norma kelompok juga turut memengaruhi perilaku dan fungsi organisasi (Lubis, 2010).

Chenhall (2004) yang dikutip oleh Diana (2012) mengemukakan bahwa faktor organisasi dalam kegunaan sistem ada tiga aspek, meliputi pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan. Menurut Notoatmodjo (2009) pelatihan adalah suatu kegiatan peningkatan

kemampuan karyawan atau pegawai dalam suatu institusi, sehingga pelatihan adalah suatu proses yang akan menghasilkan suatu perubahan perilaku bagi karyawan atau pegawai. Program pelatihan (*training*) bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang (Triton, 2009). Tujuan utama dalam sebuah organisasi adalah sebagai perencanaan sumber daya manusia, pelayanan yang diperlukan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan, pengawasan kegiatan-kegiatan, penghargaan. Kejelasan tujuan akan mendorong organisasi untuk melakukan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan (Notoatmodjo, 2009).

Menurut Dessler (2008) sebuah organisasi dapat dikatakan solid bila terjadi hubungan dinamis antara karyawan dengan karyawan lain, serta hubungan yang harmonis antara karyawan dengan atasan. Kegiatan atau perilaku bekerja yang saling mendukung antara satu dengan yang lain akan membentuk kerja sama team menjadi solid sehingga tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dapat direalisasikan dengan baik. Dukungan Atasan diartikan sebagai daya yang diperlukan, Kejelasan Tujuan didefinisikan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah disemua level organisasi, dan pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem.

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang terdiri atas kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input (masukan) menjadi output (keluaran).

Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Output-nya adalah laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian proses ataupun prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Tahap-tahap dalam siklus akuntansi dimulai dari bukti transaksi, jurnal, posting ke buku besar, membuat neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo, membuat laporan keuangan, jurnal penutupan, dan neraca setelah penutupan. Laporan Keuangan, sesuai dengan siklus akuntansi, setelah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian disusun laporan-laporan keuangan dengan mengambil data neraca saldo setelah penyesuaian.

Berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian maka dibuatlah: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan mengacu pada SAP. Dengan catatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tidak mengatur perubahan atas pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Menurut Mulyadi (2016) sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi. Informasi yang disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi telah diatur dalam standar akuntansi yang telah ditetapkan.

Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN, 2001) Departemen Keuangan RI

sistem akuntansi keuangan secara sederhana adalah suatu sistem informasi yang menggabungkan proses pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri terdapat dalam Keputusan Mendagri No.29 Tahun 2002, tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan menyusun perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbunyi: sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi (pasal 70:ayat 1).

Menurut Setiawati (2011) sistem informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Selanjutnya menurut Chabib dan Heru (2010:10), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya.
2. *Value for Money*, indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. *Value for Money* mencakup ketidakhematan dan ketidakefektifan.
3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*Probity*), pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalisir.
4. Transparansi, keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.
5. Pengendalian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif efisien, dan akuntabel. Indikator yang digunakan dalam mengukur kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Chenhall (2004) diadopsi dari Nurdin (2012) adalah sebagai berikut:

1. Validity, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi
2. Reliability, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat dipercaya
3. Efisien, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat menghemat penggunaan biaya.
4. Efektif, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal.

Menurut Halim dan Kusufi dalam Akuntansi Keuangan Daerah (2014) yang di kutip oleh Erlina (2015) akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu:

1. *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal. Dalam sistem *single entry*, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu

kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat disisi penerimaan, sedangkan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat disisi pengeluaran di dalam Buku Kas Umum (BKU). *Single entry* ini disebut dengan pembukuan. Sistem pencatatan *single entry* memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, antara lain kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan), sulit menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi. Selain itu, sistem ini memiliki kelemahan karena tidak dapat menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah.

2. *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali, dalam artian, bahwa setiap transaksi minimal akan memengaruhi dua perkiraan, satu disisi debit dan satu disisi kredit. Sisi debit ada di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit ada di seblah kanan. Dalam melakukan pencatatan tersebut, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistim ini disebut dengan menjurnal.

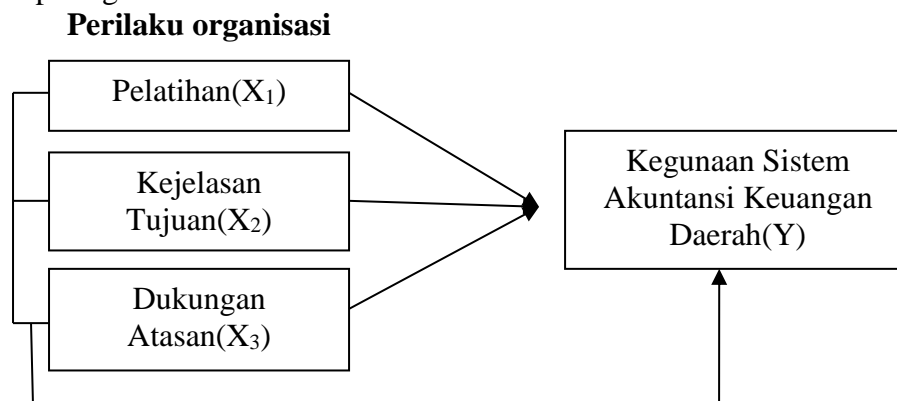
3. *Triple entry*

Sistem pencatatan *triple entry* pada dasarnya adalah sistem pencatatan yang menggunakan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada *double entry*. Dengan adanya *triple entry* ini, maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pencatatan dengan sistem *triple entry* ini dilaksanakan saat pencatatan *double entry* dilaksanakan, maka sub bagian pembukuan (Bagian Keuangan) pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cyntia (2013) tentang pengaruh kejelasan tujuan dan dukungan atasan terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Pada Dinas di Pemerintah Kota Padang) menunjukkan bahwa kejelasan tujuan berpengaruh signifikan positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, sedangkan dukungan atasan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Penelitian Yusrawati (2015) tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang.

Dari kajian teori dan penelitian terdahulu diatas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran penelitian seperti gambar 1 berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka Hipotesis penelitian ini adalah:

1. Keperilakuan organisasi (pelatihan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Keperilakuan organisasi (kejelasan tujuan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
3. Keperilakuan organisasi (dukungan atasan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
4. Faktor keperilakuan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian ini hanya dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil bagian keuangan dan administrasi yang ada di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah sebanyak 30 orang. Sampel yang digunakan adalah sampling jenuh yang merupakan teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel (Kuncuro, 2009 dalam Kayati, 2016)

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menjawab permasalahan pertama, kedua dan ketiga dan ke empat dengan menggunakan Analisa Regresi Linier berganda dan koefisien determinasi (Agussalim, 2015).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t (parsial) dan uji F (simultan) dengan toleransi error 5 persen. Sebelum proses analisis regresi linier berganda terlebih dahulu dilakukan uji instrumen penelitian (kuesioner dengan uji validitas dan reliabilitas serta asumsi klasik).

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Faktor organisasi dalam implementasinya dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Pelatihan (X₁)

Menurut Notoatmodjo (2009) pelatihan adalah suatu kegiatan peningkatan kemampuan karyawan atau pegawai dalam suatu institusi, sehingga pelatihan adalah suatu proses yang akan menghasilkan suatu perubahan perilaku bagi karyawan atau pegawai.

Menurut Dessler (2003) yang di kutip oleh Darmawan (2013) pengukuran hasil program pelatihan didasarkan pada empat kategori yaitu :

- a. Reaksi, mengevaluasi bagaimana reaksi orang yang dilatih terhadap program.
- b. Pembelajaran, melakukan pengujian terhadap sesuatu yang telah dipelajari sesuai dengan prinsip, keterampilan dan fakta yang seharusnya.
- c. Perilaku, melihat kembali bagaimana perilaku seseorang yang telah menyelesaikan pelatihan.
- d. Hasil, mengevaluasi keseluruhan dari hasil akhir setelah dilakukannya pelatihan.

Untuk pengukuran pelatihan maka digunakan 8 item pernyataan, skala pengukuran yang digunakan adalah 5 tingkat Likert, dalam hal ini respon jawaban terendah yang diberikan adalah 1, sedangkan respon jawaban tertinggi adalah 5. Secara umum pilihan jawaban yang digunakan meliputi Sangat Tidak Setuju (STS) = 1, Tidak Setuju (TS) = 2, Netral (N) = 3, Setuju (S) = 4, Sangat Setuju (SS) = 5.

2. Kejelasan Tujuan (X₂)

Menurut Notoatmodjo (2009) tujuan utama dalam sebuah organisasi adalah sebagai perencanaan sumber daya manusia, pelayanan yang diperlukan, seleksi, pelatihan dan

pengembangan, penempatan, pengawasan kegiatan-kegiatan, penghargaan.

Kejelasan tujuan akan mendorong organisasi untuk melakukan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan. Untuk mengukur kejelasan tujuan maka digunakan indikator yang diadopsi dari Nurdin (2012) yaitu sebagai berikut:

- a. Transparansi Sasaran, merupakan keterbukaan di dalam perusahaan kepada setiap anggota organisasi tentang adanya sebuah tujuan yang harus dicapai.
- b. Perencanaan adalah rangkaian kegiatan atau prosedur yang dapat dilakukan karyawan dalam mencapai tujuan.
- c. Target, merupakan standar sasaran yang dibebankan kepada masing-masing anggota organisasi.
- d. Pengawasan adalah proses pengamatan yang dilakukan manajemen terhadap anggota organisasi dalam mencapai tujuan.
- e. Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada karyawan yang tidak bekerja sesuai dengan prosedur atau standar yang diharuskan perusahaan.

Untuk Mengukur kejelasan tujuan maka digunakan 10 item pernyataan, skala pengukuran yang digunakan adalah 5 tingkat Linkert, dalam hal ini respon jawaban terendah yang diberikan adalah 1, sedangkan respon jawaban tertinggi adalah 5. Secara umum pilihan jawaban yang digunakan meliputi Sangat Tidak Setuju (STS) = 1, Tidak Setuju (TS) = 2, Netral (N) = 3, Setuju (S) = 4, Sangat Setuju (SS) = 5.

3. Dukungan Atasan (X₃)

Dessler (2008) sebuah organisasi dapat dikatakan solid bila terjadi hubungan dinamis antara karyawan dengan karyawan lain, serta hubungan yang harmonis antara karyawan dengan atasan. Kegiatan atau perilaku bekerja yang saling mendukung antara yang satu dengan yang lain akan membentuk kerja sama team solid sehingga tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dapat direalisasikan dengan baik. Untuk mengukur dukungan atasan maka digunakan indikator yang diadopsi oleh Nurdin (2012) yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi atasan dalam bekerja, merupakan tindakan nyata dari atasan yang ikut bekerja bersama-sama anggota organisasi lainnya.
- b. Motivator, di dalam sebuah organisasi pimpinan adalah seorang motivator yang mendorong bawahannya untuk dapat mencapai sasaran atau target yang telah disepakati.
- c. *Reward* merupakan penghargaan yang diberikan atasan ketika karyawan atau bawahan dapat mencapai sasaran atau target yang direncanakan.

Untuk mengukur dukungan atasan maka digunakan 6 item pernyataan, skala pengukuran yang digunakan adalah 5 tingkat Linkert, dalam hal ini respon jawaban terendah yang diberikan adalah 1, sedangkan respon jawaban tertinggi adalah 5. Secara umum pilihan jawaban yang digunakan meliputi Sangat Tidak Setuju (STS) = 1, Tidak Setuju (TS) = 2, Netral (N) = 3, Setuju (S) = 4, Sangat Setuju (SS) = 5.

4. Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)

Adapun implementasi dari sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik. sistem akuntansi keuangan daerah dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel. Pengukuran kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan item yang dikembangkan dengan memodifikasi instrumen yang digunakan oleh Chanhall (2004) yang dikutip dalam Nurdin (2012) yaitu:

1. *Validity*, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi.
2. *Reliability*, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat dipercaya.

3. Efisien, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat menghemat penggunaan biaya.
4. Efektif, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal.

Untuk mengukur kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah maka digunakan 8 item pernyataan, skala pengukuran yang digunakan adalah 5 tingkat Linkert, dalam hal ini respon jawaban terendah yang diberikan adalah 1, sedangkan respon jawaban tertinggi adalah 5. Secara umum pilihan jawaban yang digunakan meliputi Sangat Tidak Setuju (STS) = 1, Tidak Setuju (TS) = 2, Netral (N) = 3, Setuju (S) = 4, Sangat Setuju (SS) = 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Validitas dan Reliabilitas

Sebelum instrument kuesioner diberikan kepada responden terlebih dahulu di uji validitas dan reliability. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Instrumen dikatakan valid jika nilai signifikansi dari skor butir instrumen (Sig 2 tailed) < 0,05 (5%).

Berdasarkan proses pengolahan data dapat diperoleh hasil uji validitas dari masing-masing variabel independen (pelatihan, kejelasan tjuan, dukungan atasan) dan variabel dependen (kegunaan sistem akuntansi keuangan) seperti tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Pengujian validitas

Keterangan	Sig	Alpha	Kesimpulan
Pelatihan	0.000	0.05	Valid
Kejelasan Tujuan	0.000	0.05	Valid
Dukungan Atasan	0.000	0.05	Valid
Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan	0.000	0.05	Valid

Sumber: Diolah Penulis (2017)

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa hasil uji validitas dari semua variabel independen (pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan) dan variabel dependen (kegunaan sistem akuntansi keuangan) mempunyai nilai signifikansi 0.000 dimana Sig 0.000 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan kuesioner pada semua variable dinyatakan valid.

Menurut Ghozali (2011:47) dalam Kayati (2016), reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam penelitian menggunakan bantuan program SPSS Statistik 16 dengan analisis uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Apabila nilai (α) lebih besar dari 0,07 dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian reliabel (Ghozali, 2011 dalam Kayati, 2016). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Pengujian Reliabilitas

Keterangan	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Batas	Kesimpulan
Pelatihan	0.719	0.07	<i>Reliable</i>
Kejelasan Tujuan	0.815	0.07	<i>Reliable</i>
Dukungan Atasan	0.845	0.07	<i>Reliable</i>
Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan	0.911	0.07	<i>Reliable</i>

Sumber: Diolah Penulis (2017)

Berdasarkan tabel 2 dapat kita lihat bahwa seluruh variabel dependent dan variabel independent memiliki nilai *cronbach alpha* > 0.07, sehingga untuk seluruh variabel tersebut *reliable* dan dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data. Selain itu penelitian ini juga sudah dilakukan uji asumsi klasik.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang perilaku keorganisasian (pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan) terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat seperti tabel 3 di bawah ini

Tabel 3. Pengujian Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	-2.992	8.729		-.343	.735		
X1	.236	.279	.144	.844	.406	.711	1.407
X2	.209	.242	.185	.867	.394	.458	2.184
X3	.903	.362	.472	2.499	.019	.583	1.717

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan Spss

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dibuat persamaan regresi linier bergandanya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = -2.992 + 0.236X_1 + 0.209X_2 + 0.903X_3$$

Keterangan:

- Y = Kegunaan sistem akuntansi keuangan
- a = Konstanta
- b₁b₂b₃ = Koefisien regresi
- X₁ = Pelatihan
- X₂ = Kejelasan Tujuan
- X₃ = Dukungan Atasan

Berdasarkan persamaan diatas dapat di interpretasikan: 1) Variabel pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan mempunyai koefisien yang bertanda positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat; 2) Nilai konstanta menunjukkan pengaruh variabel X dan Y (pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan). Artinya, pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan sama dengan nol, maka kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar -2.992 poin; 3) nilai koefisien regresi pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar 0.236, artinya jika pelatihan mengalami kenaikan 1 satuan maka kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat akan naik sebesar 0,235 satuan dengan asumsi bahwa variabel kejelasan tujuan dan dukungan atasan konstan (X₂ dan X₃ = 0). Koefisien bernilai positif, artinya pelatihan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat; 4) nilai koefisien regresi variabel kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 0,209, artinya apabila kejelasan tujuan mengalami kenaikan 1 satuan maka kegunaan

sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,261 satuan dengan asumsi bahwa variabel pelatihan dan dukungan atasan konstan (X_1 dan $X_3 = 0$). Koefisien bernilai positif, artinya kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. 5) nilai koefisien regresi variabel dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 0,903, artinya apabila dukungan atasan mengalami kenaikan 1 satuan maka kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,903 satuan dengan asumsi bahwa variabel pelatihan dan kejelasan tujuan konstan (X_1 dan $X_2 = 0$). Koefisien bernilai positif, artinya dukungan atasan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Hasil analisa koefisien determinasi menunjukkan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.673 ^a	.452	.389	4.195

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan Spss

Berdasarkan tabel 4 di atas diperoleh angka *adjusted R²* sebesar 0.389 atau 38.9%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen (pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan) terhadap variabel dependen (kegunaan sistem akuntansi keuangan) sebesar 38.9% atau variasi variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 38.9% variasi variabel dependennya. Sedangkan sisanya 61.1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t) dan Hipotesis Simultan (Uji F)

Pengujian pengaruh parsial bertujuan untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara parsial dengan $\alpha = 0,05$ dan juga penerimaan atau penolakan hipotesis.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, maka diperoleh hasil pengujian secara parsial sebagai berikut:

Tabel 5. Pengujian Hipotesis

KETERANGAN	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	ALPHA	KESIMPULAN
	B	Std. Error	Sig		
Konstanta	-2.992	8.729	.735		
Pelatihan	.236	.279	.406	0.05	Tidak Signifikan
Kejelasan Tujuan	.209	.242	.394	0.05	Tidak Signifikan
Dukungan Atasan	.903	.362	.019	0.05	Signifikan

a. Dependent Variable: Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan

Sumber: Hasil Pengolahan Spss

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pelatihan diperoleh nilai signifikansi 0.406. Nilai signifikansi $> \alpha = 0.05$ dan maka H_A ditolak dan H_0 diterima. Artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pelatihan (X_1) terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan (Y) di Badan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, hipotesis pertama ditolak
2. Variabel kejelasan tujuan diperoleh nilai signifikansi 0.394. Nilai signifikansi $> \alpha = 0.05$ dan maka H_A ditolak dan H_0 diterima. Artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kejelasan tujuan (X_2) terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan (Y) di Badan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, hipotesis kedua ditolak
3. Variabel dukungan atasan diperoleh nilai signifikansi 0.019. Nilai signifikansi $> \alpha = 0.05$ dan maka H_0 ditolak dan H_A diterima. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara dukungan atasan (X_3) terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan (Y) di Badan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, hipotesis ketiga diterima.

Untuk menjawab hipotesis keempat dilakukan Uji simultan (uji F). Uji F ini digunakan untuk melihat apakah variabel independent yaitu pelatihan (X_1), kejelasan tujuan (X_2) dan dukungan atasan (X_3) secara bersama-sama terhadap variabel dependent yaitu kegunaan sistem akuntansi keuangan (Y) di Badan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hasil perhitungan statistik uji F dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Hasil Uji Simultan

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	377.898	3	125.966	7.157	.001 ^a
Residual	457.602	26	17.600		
Total	835.500	29			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan Spss

4. Dari tabel 6 di atas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 7.157 dan nilai signifikansi 0.001. Nilai signifikan $< \alpha = 0.05$ maka Hipotesis nol (H_0) ditolak dan H_4 diterima, artinya variabel pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan (Y) di Badan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, hipotesis keempat diterima.

Pembahasan:

1. Pengaruh Pelatihan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan analisis regresi, diketahui bahwa variabel Pelatihan berpengaruh positif terhadap kegunaan system akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan hasil uji t menunjukkan bahwa pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan system akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Secara empiric hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cecilia (2015) tentang Analisis Faktor Organisasional dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Diantara hasil penelitiannya menemukan bahwa pelatihan dan dukungan atasan tidak berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Hasil penelitian seharusnya dapat memperjelas arti penting dari program pelatihan

untuk menguasai sistem akuntansi yang digunakan di kantor Badan Keuangan Daerah, Dengan adanya panduan dan pelatihan langsung oleh tenaga ahli yang berpengalaman tentu akan sangat bermanfaat dalam menambah pengetahuan karyawan dalam memanfaatkan sistem informasi. Namun tidak adanya program pelatihan maka tidak akan mampu memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan yang lebih rinci serta tidak dapat juga memecahkan kasus dalam bentuk aplikasi dan pemanfaatan sistem, serta tidak pula mampu memberikan pengetahuan secara terperinci dalam kegunaan sistem akuntansi keuangan yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. Pengaruh Kejelasan Tujuan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan analisis regresi, diketahui bahwa variabel kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan hasil uji t menunjukkan bahwa kejelasan tujuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Secara empiric hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cyntia (2013) tentang Pengaruh Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Pada Dinas di Pemerintah Kota Padang). Diantara hasil penelitiannya menemukan bahwa kejelasan tujuan berpengaruh signifikan positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, sedangkan dukungan atasan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Hasil yang diperoleh dalam pengujian menunjukkan tidak sejalan dengan hipotesis, kondisi ini terjadi karena anggota organisasi jarang menggunakan sistem akuntansi keuangan dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan dalam bekerja, akibatnya kejelasan tujuan suatu organisasi tidak diprioritaskan dalam program kegunaan sistem akuntansi keuangan sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

3. Pengaruh Dukungan Atasan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan analisis regresi, diketahui bahwa variabel dukungan atasan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan hasil uji t menunjukkan bahwa dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Secara empiric hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shield (1995) dalam Nurdin (2012), dukungan manajemen puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Manajer (atasan) dapat fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif yang direncanakan apabila manajer (atasan) mendukung sepenuhnya dalam implementasi.

Dukungan atasan dalam kegunaan sistem akuntansi keuangan di dalam suatu organisasi tentu harus diimbangi dengan kemampuan dan skill dari anggota organisasi dalam menjalankan suatu sistem, oleh karena itu seorang pimpinan sangat mendukung berbagai aktifitas yang dapat menambah kemampuan organisasi dalam menjalankan suatu sistem. Semakin tinggi pemanfaatan program tentu akan semakin meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan.

4. Pengaruh Pelatihan, Kejelasan Tujuan, Dan Dukungan Atasan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari pelatihan,

kejelasan tujuan dan dukungan atasan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kegunaan system akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan nilai signifikan F adalah 0.001. Oleh karena signifikansi kurang dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan system akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan dari atasan akan mampu meningkatkan kegunaan system akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil penelitian juga diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0.389 yang berarti bahwa pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan memberikan kontribusi dalam mempengaruhi kegunaan system akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar 38,9%, dan sisanya sebesar 61,1 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian ini.

SIMPULAN

Simpulan penelitian ini adalah, pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan system akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dikarenakan nilai signifikansinya lebih besar daripada α ($0.406 > 0.05$). Kejelasan tujuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan system akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dikarenakan nilai signifikansinya lebih besar daripada α ($0.394 > 0.05$). Dukungan atasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan system akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dikarenakan nilai signifikansinya lebih kecil daripada α ($0.019 < 0.05$). Pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kegunaan system akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, M. 2015. *Statistik Lanjutan*. Padang: Ekasakti Pres.
- BAKUN. 2001. Badan Akuntansi Keuangan Negara. Departemen Keuangan RI.
- Cecilia. 2015. *Analisis Faktor Organisasional dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Kantor BPKP Maluku, Ambon*. Universitas Negeri Jakarta.
- Cyntia, C. 2013. *Pengaruh Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Pada Dinas di Pemerintah Kota Padang)*. Universitas Negeri Padang.
- Darmawan, D. 2013. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Surabaya: PT. Jepe Press Media Utama.
- Dessler, G. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Indo). Jakarta: Erlangga.
- Diana, N. 2012. *Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan daerah*. Universitas Bung Hatta, Padang.
- Erlina, D. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kayati. 2016. *Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Universitas Negeri Semarang.
- Lubis, A. ikhsan. (2010). *Akuntansi Keperilakuan* (edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi* (Edisi Keem). Jakarta: Salemba Empat.
- Notoatmodjo, S. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rivai, V. 2008. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Edisi Kedu). Jakarta: PT. Raja Grafindo ersada.
- Setiawati, A. D. dan L. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: ANDI.

- Triton, P. (2009). *Mengelola Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: ORYZA.
- Yusrawati., D. A. dan. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan*. Universitas Islam Riau.
- Keputusan Menteri dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 (pasal 70:ayat 1).
- Peraturan pemerintah No.21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.